**IMPLEMENTASI PERAN PEMERINTAH DAERAH**

**DALAM PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE***

**PADA PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN**

**DI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2018-2021**

**Daniel Maipon1\*,Utang Suwaryo2, Nandang A. Deliarnoor 3**

123Government Science Postgraduate Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Padjadjaran University, Bandung, West Java, Indonesia  
\*Corresponding Author E-mail: [danielmaipon@gmail.com](mailto:danielmaipon@gmail.com)

**Abstract**:

The objectives of this study (1) are to analyze the role of local governments in implementing Good Governance in educational services in Nabire Regency in 2018-2021; (2) To analyze the factors supporting and inhibiting the role of the Regional Government in the implementation of Good Governance in educational services in Nabire Regency in 2018-2021; (3) To analyze the quality of public services in the education sector in Nabire Regency in 2018-2021. The result is that the role of the Nabire Regency Government in implementing Good Governance in education services has not gone well, because it has not fulfilled the 5 principles of Alfredo Enrione et al., namely: Orderly Administration, Public Interest, Openness, Proportionality and Professionalism. In addition, the inhibiting factors for the role of the Nabire District Government in implementing Good Governance in educational services are the absence of a local government accounting system, the lack of qualified human resources, the emergence of corruption and the existence of a feudalistic style as well as the lack of community participation and the lack of discipline of the apparatus. While the supporting factors for the role of the Regional Government of Nabire Regency in implementing Good Governance in educational services are organizational structure, organizational culture, government and community collaboration

Keywords: Implementation, Role of Local Government, Good Governance, Public Service, Education

**Abstraksi:**

Tujuan penelitian ini (1) Untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Nabire Tahun 2018-2021; (2) Untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Pemerintah Daerah dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan pendidikan di Kabupaten Nabire Tahun 2018-2021; (3) Untuk menganalisis kualitas pelayanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Nabire Tahun 2018-2021. Hasilnya Peran Pemerintah Kabupaten Nabire dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan bidang pendidikan belum berjalan baik, karena belum memenuhi 5 prinsip Alfredo Enrione et all, yaitu: Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Profesionalitas. Disamping itu faktor penghambat peran Pemerintah Daerah kabupaten Nabire dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan pendidikan adalah belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah, minimnya SDM yang berkualitas, munculnya korupsi dan adanya gaya feodalisme serta kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung peran Pemerintah Daerah kabupaten Nabire dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan pendidikan adalah struktur organisasi, budaya organisasi, kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

Kata kunci: Implementasi, Peran Pemerintah Daerah, *Good Governance*, Pelayanan publik, pendidikan

**PENDAHULUAN**

Pelayanan pendidikan mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan pendidikan. Dalam ILPPD kabupaten nabire 2020 dapat dilihat bahwa SPM sudah terpenuhi. Aspek pelayanan minimal pendidikan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/u/2004 tentang standar pelayanan minimal. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, penyelenggara pelayanan pendidikan Kabupaten Nabire menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk memaksimalkan pelayanan pendidikan. *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi timbulnya aktivitas usaha (*World Bank* dalam Mardiasmo, 2010).

Dinas Pendidikan kabupaten Nabire berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menerapkan pelayanan publik berbasis kependidikan mengacu kepada prinsip *good governance,* yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan di sektor pendidikan lembaga pelayanan yang mengatur secara tata struktural dilakukan oleh lembaga pendidikan yang sesuai untuk ketercapaian dan ketepatan lembaga dalam membidangi urusan pelayanan publik. Pelayanan sektor publik yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan pendidikan yang terpenuhi. Sebagaimana Wasistiono (2003) menjelaskan prinsip *good governance* harus digunakan sebagai patokan dalam mekanisme pelayanan dan dasar hukum tepat agar pelayanan terhindar dari segala penyimpangan yang akan ditemukan baik secara internal maupun eksternal. Begitupun halnya pelayanan pendidikan. Hal ini dipandang penting mengingat Pemerintah harus berpartisipasi dan berperan aktif dalam lembaga pendidikan. Pemerintah kabupaten Nabire dalam hal ini harus melakukan upaya dalam mengarahkan, membimbing, membantu, serta mengawasi penyelenggaraan pendidikan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Pemerintah Daerah kabupaten Nabire harus bisa mengarahkan masyarakat agar menjadikan pendidikan sebagai tolak ukur didalam kehidupan sehari-hari. Membimbing masyarakat ikut menjalankan pendidikan yang sudah diarahkan pemerintah daerah serta membantu pelayanan pendidikan agar memudahkan masyarakat yang ingin melaksanakan pendidikan namun terhalang oleh biayanya. Pemerintah Daerah kabupaten Nabire juga bisa mengawasi jalannya lembaga pendidikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam hal ini memiliki tugas dan fungsi sebagai penyedia, pelayanan serta pemberdayaan melalui sektor lembaga pendidikan serta wajib untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi setiap warga masyarakatnya.

Beberapa alasan mendasar agar Pemerintah Daerah kabupaten Nabire melaksanakan evaluasi penyelenggaraan *good governance* khususnya pelayanan di bidang pendidikan adalah: *Pertama*. Kabupaten Nabire selama ini sering menerima kunjungan atau studi banding dari beberapa daerah terdekat diantaranya kabupaten Dogiyai, Deyai dan Paniai serta beberapa daerah pegunungan lainnya seperti Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya, baik dari pihak eksekutif dan legislatif. *Kedua*. Kabupaten Nabire menjadi pilot proyek berbagai bidang pembangunan yang dijadikan tolok ukur bagi daerah sekitarnya untuk mengadobsi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nabire. *Ketiga*. Kabupaten Nabire dianggap memiliki keunikan tersendiri dalam menata penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari berbagai segi termasuk dalam peyanan pendidikan. *Keempat*. Secara administratif pemerintahan, kabupaten Nabire perlu melakukan penataan secara bertahap dan berkesinambungan ke arah yang lebih baik, profesional dan modern. Alasan tersebut bukan karena proses penyelenggaraan pemerintahan tidak ada kekurangan atau kelemahan. Kekurangan atau kelemahan tersebut harus terus dievaluasi sambil berusaha meningkatkan apa yang telah dianggap baik dan memberi kontribusi besar pada proses penyelenggaraan pembangunan.

Pada observasi awal, peneliti mendapatkan beberapa persoalan terkait pelayanan publik dalam bidang pendidikan di kabupaten Nabire. Berikut penjelasannya. **Sarana dan Prasarana.** Persoalan pertama adalah terkait fasilitas sarana dan prasarana seperti kerusakan bangku sekolah, gedung yang sudah tidak layak dipakai, dll. Pemerintah kabupaten Nabire dalam hal ini belum sepenuhnya memperhatikan sarana prasarana seperti gedung atau bangunan sekolah mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Sekolah Menengah Atas (SMA). **AUSTS.** Persoalan lain adalah menyangkutAnak Usia Sekolah Tidak Sekolah atau yang disingkat dengan [AUSTS](https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Anak+Usia+Sekolah+Tidak+Sekolah), yaitu anak-anak yang masih berada dalam rentang usia sekolah, namun tidak bersekolah dengan berbagai sebab dan alasan. Dan di kabupaten Nabire masih banyak anak yang dalam status AUSTS tersebut. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tahun 2021[[1]](#footnote-1), bahwa dari seluruh anak usia sekolah (7-15 tahun) sebanyak 28.523 usia anak sekolah, ada 20.184 usia anak sekolah, dan total 8.339 usia anak tidak bersekolah. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan lebih optimal guna menekan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Angka ini mengindikasikan bahwa masih banyak anak yang tidak bersekolah meskipun telah ada program wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun dan bahkan 12 tahun. **Tenaga Guru**. Persoalan yang tidak kalah penting adalah menyangkut tenaga pendidik dimana banyak sekolah-sekolah di kabupaten Nabire yang kekurangan guru. Terutama di pelosok. Sebagaimana penjelasan Bupati Kabupaten Nabire, Mesak Magai, kepada salah satu media lokal, bahwa Kabupaten Nabire memiliki kurang lebih 2000 tenaga guru terbagi atas 312 sekolah dalam berbagai jenjang pendidikan. Dari jumlah sekian guru, setiap sekolah mendapat tenaga guru 7 orang. Maka kabupaten Nabire masih mengalami kekurangan tenaga guru[[2]](#footnote-2). Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire kepada salah satu media lokal bahwa hingga saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nabire terus mengalami kekurangan tenaga guru setiap tahunnya[[3]](#footnote-3). Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Viktor Tebai, mengakui masih banyak kekurangan guru di kabupaten Nabire sehingga pemenuhan kebutuhan guru belum memenuhi standar nasional sesuai peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005, dimana dari sisi kuantitas, jumlah tenaga guru PNS belum memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara dari sisi kualitas, banyak guru yang belum memenuhi kriteria dan sertifikasi guru, karena kebanyakan guru masih mengajar mengunakan ijazah SPG (Sekolah Pendidikan Guru)*[[4]](#footnote-4)*.

Disamping ketiga persoalan diatas, beberapa persoalan lain adalah menyangkut akses dan infrastruktur serta kurangnya pemerataan pelayanan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Nabire terutama pada tingkat desa, dimana masih banyak masyarakat desa yang tetinggal akan pendidikannya, serta tidak dapat menganyam bangku pendidikan karena akses yang sulit. Dalam hal penggunaan akses yang sulit untuk datang ke sekolah atau bahkan jarak yang jauh dari rumah ke sekolah yang memang karena m letak desa yang masih ada di pedalaman. Tentu hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire. Karena adanya faktor-faktor tersebut, tidak heran banyak masyarakat malas menganyam bangku pendidikan, dikarenakan status ekonomi yang sulit, ditambah pelayanan pendidikan yang minim sehingga berdampak buruk bagi kabupaten Nabire.

Dengan kondisi yang ada, sudah saatnya pemerintah kabupaten Nabire memaksimalkan pelayanan public dalam bidang pendidikan melalui penyediaan sarana prasarana seperti gedung atau bangunan, agar memudahkan proses belajar mengajar. Pemerintah kabupaten Nabire juga dapat memberikan pelayanan berupa keringanan dana agar masyarakat tetap bisa mengikuti dan menganyam bangku pendidikan. Tentu saja pemerintah kabupaten Nabire sangat memiliki peran aktif agar meminimalisir tingkat permasalahan pelayanan pendidikan.

Masalah lainnya adalah penyelenggaraan *good governance* di kabupaten Nabire belum melibatkan secara sinergis 3 (tiga) pilar utama *good governance* yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat. Sehingga berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada sektor pelayanan publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, sebab analisis yang akan dilakukan dengan semua prinsip, bisa memberikan gambaran yang jelas prinsip mana saja yang sudah diterapkan dengan baik dan prinsip mana saja yang belum diterapkan dengan baik atau bahkan sama sekali belum diterapkan.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*) melalui proses menemukan, memahami, menjelaskan dan memperoleh gambaran tentang fenomena sosial dan fenomena publik yang berhubungan dengan Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Penerapan *Good Governance* Pada Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Kabupaten Nabire Tahun 2018-2021. Pertimbangan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada penjelasan Lincoln dan Guba (1985:78) bahwa penelitian *naturalistic inquiry* untuk memahami aktualitas, realitas sosial, dan persepsi manusia yang ada. Penelitian ini menggunakan wawancara terhadap beberapa informen, serta pengamatan dan pengolahan dokumen, sebagaimana dijelaskan Moleong (2004:6-7) bahwa penentuan informen dilakukan sengaja (*purposive*) dengan memilih informan yang berkaitan dengan penelitian.

This study uses a qualitative approach through the process of finding, understanding, explaining and obtaining an overview of social phenomena and public phenomena related to the Implementation of the Role of Local Governments in the Implementation of Good Governance in Public Services in the Education Sector in Nabire Regency in 2018-2021. The consideration of using a qualitative approach in this study is based on the explanation of Lincoln and Guba (1985:78) that naturalistic inquiry research is to understand actuality, social reality, and existing human perceptions. This study used interviews with several informants, as well as observation and document processing, as explained by Moleong (2004:6-7) that the determination of informants was carried out purposively by selecting informants related to research.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan adalah ‘titik nadir’kehidupan. Ada banyak ilmu dan pengetahuan yang mampu didendangkan dari balada tentang kehidupan ketika pendidikan itu hidup dalam hidup dan kehidupan yang benar-benar “*menjadi hidup*”. Hal ini membawa suatu pemahaman mendasar bahwa secara aksiomatis, awal berlangsungnya sebuah kehidupan akan berjalan pula dengan dihidupkannya pendidikan. (Busthan Abdy, 2016:5). Dalam hal ini pendidikan adalah bagian terpenting dalam pengalaman hidup manusia. Itu sebabnya pendidikan memiliki makna dan pengertian yang sangat luas. Sehingga setiap orang, berhak mendefenisikan pendidikan sesuai dengan latar dan konteks pengalaman hidupnya masing-masing. (Busthan, 2016:26).

Secara sederhana, pendidikan dalam kajian yang lebih umum adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, dll. Secara etimologis, kata *‘pendidikan’* berasal dari kata dasar ‘*didik*’, yang kemudian ditambahkan imbuhan pada awal kalimat, yaitu (*‘pe’*) dan imbuhan pada akhir kalimatnya, yaitu (*‘an’*), sehingga membentuk kata “*pen-*didik-*an* = pendidikan”. Sementara kata kerja ‘*mendidik*’, mengandung pengertian membantu anak untuk dapat menguasai beberapa pengetahuan, keterampilan, perilaku, sifat dan sikap serta nilai-nilai yang diwarisi dari lingkungannya, yakni dalam keluarga dan masyarakat. (Busthan Abdy, 2016:27)

Jean Piaget (1926) menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk menghasilkan dan mencipta (sekalipun tidak banyak—sekalipun juga suatu penciptaan menjadi dibatasi pembandingan dengan penciptaan yang lain). Pandangan ini memberi makna bahwa pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dalam sepanjang hidup. Sehingga, dapat dipahami bahwa, dalam pengertian yang mencakup semuanya, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain yang lebih dewasa, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Itu sebabnya, pendidikan berlangsung melalui dan di dalam pergaulan, namun hal yang terpenting menurut Winkel W. S (2009:27) bahwa, tidak setiap pergaulan antara orang dewasa dan anak, dengan sendirinya, bersifat “pedagogis” (mendidik). Sebab itu, pergaulan akan bersifat mendidik, apabila pendidik bermaksud dan berusaha untuk mempengaruhi anak-anak, demi perkembangan anak itu, sehingga pendidik pun mempunyai wewenang terhadap anak itu. Karenanya, lanjut Winkel (2009:ibid), bahwa pendidikan adalah bantuan yang diberikan orang dewasa kepada orang yang belum dewasa, agar dia mencapai kedewasaan. Bantuan yang diberikan pendidik (orang dewasa) itu berupa pendampingan, yang menjaga agar anak didik belajar hal-hal yang positif sehingga sungguh-sungguh menunjang perkembangannya. Sehingga, cara belajar anak, dapatlah diarahkan dan tidak dibiarkan berlangsung sembarang tanpa tujuan. Tuntutan itu diberikan dengan pergaulan pedagogis pada anak, yaitu pergaulan yang bersifat mendidik.

Secara sederhana layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa *(service)* memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi *(personal service*)sampai pada jasa sebagai suatu produk (Rambat Lupiyadi dan A. Hamdani, 2006:5). Kotler dan Amstrong (2008). mendefinisikan jasa adalah  setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksi jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau sebaliknya. Selanjutnya Stanton mengungkapkan bahwa jasa diidentifikasi sebagai kegiatan tidak berwujud yang merupakan obyek utama dari transaksi yang dirancang untuk menyediakan keinginan atau kepuasan kepada pelanggan.

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik, dimana proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa yang mempunyai sifat yang tidak mengakibatkan peralihan [hak atau kepemilikan](http://www.jejakpendidikan.com/" \t "_blank). Jasa bukan barang melainkan suatu proses atau aktivitas yang tidak berwujud.

[Pendidikan dalam hal ini merupakan](http://www.jejakpendidikan.com/) proses pemanusiaan manusia atau suatu proses yang harus dilakukan baik yang terlembaga maupun tidak terlembaga yang menyangkut fisik dan non fisik dan membutuhkan infrastruktur dan skil ataupun keterampilan. Dengan demikian Jasa Pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya. (Buchari Alma, 2011:199)

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire dalam Penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di bidang Pendidikan belum sepenuhnya mengacu pada Penerapan prinsip-prinsip *Good Government* menurut Alfredo Enrione et all. (2006). *Penerapan Asas Kepastian Hukum***.** Pemerintah kabupaten Nabire dituntut menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat terlindungi. Kebijakan yang diambil didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam bentuk regulasi ditingkat kabupaten. *Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan***.** Pemerintah daerah melakukan evaluasi terkait kebijakan atau program yang sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi untuk memastikan kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik. *Penerapan Asas Kepentingan Umum.*Penerapanya melalui proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat, selanjutnya pembahasan ditingkat kabupaten, melalui musyawarah, menentukan program kerja pemerintah berdasarkan masukan berbagai pihak yang berkepentingan. *Penerapan Asas Keterbukaan.*Masyarakat harus mengetahui program kerja pemerintahan khususnya dalam pembangunan. Pola keterbukaan oleh pemerintah mendorong masyarakat berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah. *Penerapan Asas Proporsionalitas.*Dilakukan pemetaan dalam dua hal, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh pemerintah dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi pemerintah daerah itu sendiri. *Penerapan Asas Profesionalitas.* Menggunakan indikator latar belakang pendidikan dengan tupoksi guna mengantisipasi permasalahan sehingga dilaksanakan program yang berfungsi meningkatkan keahlian.

**SIMPULAN**

Peran Pemerintah Kabupaten Nabire dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan bidang pendidikan belum berjalan baik, karena belummemenuhi 5 prinsip Alfredo Enrione et all (2006) yaitu: Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Profesionalitas

Faktor penghambat peran Pemerintah Daerah kabupaten Nabire dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan pendidikan adalah belum adanya sistem akuntansi pemerintahan daerah, minimnya SDM yang berkualitas, munculnya korupsi, dan adanya gaya feodalisme, serta kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya kedisiplinan aparat. Faktor pendukung peran Pemerintah Daerah kabupaten Nabire dalam penerapan *Good Governance* pada pelayanan pendidikan adalah struktur organisasi, budaya organisasi, dan kerjasama Pemerintah dan Masyarakat.

**UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyadari karya ini terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Patut penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan kontribusi pikiran dalam memperkaya substansi karya ini. Khusus penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs.Utang Suwaryo M.A., selaku pembimbing I yang dengan ketulusan, kecermatan serta kesabaran telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini
2. Prof. Dr. H. Nandang H Deliarnor, SH. M.Hum., selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dan mengoreksi dengan seksama tesis ini hingga dapat terselesaikan

**DAFTAR PUSTAKA**

Adrian, Sutedi. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Aldridge, John. E dan Siswanto Sutojo. (2008). *Good Corporate Governance*. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka.

Alfredo, Enrione et all. (2006). *Institutionalizing Codes* *of Governance*. American Behavioral Scientist Vol. 49, No.7 March. Sage Publications

Alijoyo, Antonius dan Subartono Zaini. (2004). *Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Jakarta: PT. Indeks.

Ani, Sri, Rahayu. (2017). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Malang: Sinar Grafika

Arifin, Zainal. (2011). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Buchari, Alma. (2011). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa.* Bandung: Alfabeta

Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan* *Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta:Putra Grafika

Busthan, Abdy. (2016). *Pengantar Pendidikan: Konsep & Dasar Pelaksanaan Pendidikan*. Kupang: Desna Life Ministry

Dede, Rosyada Dkk (2000). *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of* Management, 16: 49-64.

Dwiyanto, Agus. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik.* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. (2006). *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada..

G. Setya, Nugraha, R. Maulina f. (2000). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Karima

67

Gibbon, P. (1993). *The World Bank and the new* *politics of aid. In Political conditionality, ed.* *Georg Sorensen*. London: Frank Cass

Hadi, Supeno. (2009). *Korupsi di Daerah, Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Yogyakarta: Total Media

Hamdani. (2016). *Good Corporate Governance* (Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Idi, Abdullah, H. (2011). Sosiologi Pendidikan: Individu, Masyarakat dan Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers

Keputusan Menteri BUMN. (2011). Nomor: PER-01/MBU/2011. *Penerapan Praktek Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara.*

Kotler dan Amstrong (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jilid 1 dan 2.Edisi 12.Jakarta: Erlangga.

Kurniawan, Agung. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

La Ode, Bariun. (2015). *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian* *Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan.* Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar

Levine, Charles H, B. Guy Peters and Frank J. Thompson (1990). *Public* *Administration Challnegers Choices, Consequences, Scott, Foresman* *Little*. Ilinois, USA : Glenview.

Lim, Siong Guan. (1996). *The Public Service, in Yeo* *Lay Hwee (ed.), Singapore: The Year in Review*, 1995. Singapore: Times Academic Press

Lincoln dan Guba (1985). *Naturalistic Inqury*. California: Sage

Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Makasar:PT Raja Grafindo Persada

Mudyahardjo, Redja. (2011). *Pengantar Pendidikan: Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Nasution. (1996). *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung, Penerbit Tarsito

Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta.

Pidarta, Made. (2009). *Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta

Philipus M. Hadjon. (1998). *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya: Fakultas Hukum Unair

Piaget, Jean. (1926). *The Chiild’s Conception of the World*. Terjm. J. & A. Tomlinson. Savege, MD: Littlefield, Adams and Co., 1963

Polancik, Gregor. (2009). *Empirical Research Method Poster*. Jakarta.

Rambat, Lupiyadi dan A. Hamdani. (2006). *Manajemen Pemasaran Jasa.* (edisi II). Jakarta: Salemba Empat

Rewansyah, Asmawi (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Bogor: CV. Yusaintanas Prima

Salam, Burhanudin H. (2011). *Pengantar Pedagogik: Dasar-Dasar Ilmu Mendidik.* Jakarta: Rineka Cipta

SF. Marbun (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty

Sinyo, Harry, Sarundajang. (1999). *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Stiglitz, J. (1999). *The World Bank at the millennium.* Economic Journal 109: pp 577-97.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu, Kencana. (2010). *Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta; Refika Aditama

Toha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya.* Jakarta: Grafindo Persada

Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, dan Apriyanto Moha (2017). “*Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola* *Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya* *Kabupaten Gorontalo”.* Jurnal Ilmiah Hukum. Volume 11. Mei 2017.

Winkel W S. (2009). *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: PT. Grasindo

World Bank. (1989). *Sub-Saharan Africa: From Crisis* *to Sustainable Growth*. Washington: World Bank

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(1992a). *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.(1992b). *Proceedings of the World Bank* *annual conference on Development Economics* *1991*.Washington, DC: World Bank

Yudi Supriadi (2015). “*Pelaksanaan Good Governance (Tata Pemerintahan Yang Baik) Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*”. Journal Ilmu Pemerintahan, 3 (1) 2015: 52-66

1. [https://nabirekab.go.id/portal/pendidikan/diakses tanggal 23 Februari 2022](https://nabirekab.go.id/portal/pendidikan/diakses%20tanggal%2023%20Februari%202022), Pukul 12.34 WIT [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://www.nabire.net/masalah-utama-di-nabire-adalah-masalah-pendidikan/> diakses tanggal 23 Februari 2022, Pukul 13.30 WIT [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://www.papuaposnabire.com/News/Read/9275--nabire-kekurangan-guru-setiap-tahun> diakses tanggal 23 Februari 2022, Pukul 16.21 WIT [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://jubi.co.id/dinas-pendidikan-nabire-akui-kekurangan-guru/> diakses tanggal 23 Februari 2022, Pukul 16.56 WIT [↑](#footnote-ref-4)